

Vol 4 No 2

Fitria

fmpit848@gmail.com

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
(STIE) Ekuitas Bandung,
Indonesia*

Kata Kunci : *Good Governance,* penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal.

Keywords : *Good Governance, implementation of government accounting standards, internal control system,.*

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (STUDI PADA SKPD KOTA BANDUNG)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden khususnya kepala sub bagian keuangan dan staf bagian keuangan pada SKPD Kota Bandung. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan nilai koefisien determinasi diketahui bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan good governance menjelaskan variasi kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD Kota Bandung sebesar 49%, sedangkan sisanya sebesar 51% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of the implementation of government accounting standards, internal control systems, and good governance of government financial reports in SKPD (Regional Work Units) of Bandung City. The research method used in this research is a quantitative method with a descriptive and verification approach, while the data collection technique is carried out by distributing questionnaires to respondents, especially the head of the finance sub-division and finance section staff at SKPD Bandung City, the sample collection technique uses non-probability sampling specifically purposive

sampling technique. Based on the calculation results, the coefficient of determination shows that the implementation of government accounting standards, internal control systems, and good governance has a 49% explanation on the quality of government financial reports in SKPD of Bandung City, the remaining 51% is attributed to other variables not examined in this study.

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama suatu periode tertentu. Tujuannya untuk menyediakan informasi yang berkualitas sehingga dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholders). Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan menjadi faktor krusial dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapatkan penilaian berupa opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara wajar dan berkualitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan baik terhadap akuntansi keuangan daerah tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan standar yang berkualitas untuk laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, yang merupakan landasan utama untuk pengelolaan keuangan daerah yang akuntabilitas dan transparansi.

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal merupakan suatu proses integral dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, sistem pengendalian internal memiliki peran penting di dalamnya. Sistem pengendalian internal bertugas sebagai pengendali dan pengawas dalam proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku dengan tujuan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat memperoleh opini audit yang baik, sehingga dapat dipercaya oleh pihak terkait.

Good Governance didefinisikan oleh Mardiasmo (2009: 17) sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintah menerapkan proses yang transparan untuk menentukan tujuan yang jelas, kinerja yang terukur, dan pencapaian yang terverifikasi, yang disebut tata kelola pemerintah yang bersih dan baik. Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d mengartikan Good Governance sebagai pemerintahan yang menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Penerapan good governance

dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan, sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas, terbebas dari penyajian data yang tidak sesuai dengan peraturan dan terbebas dari penyimpangan-penyimpangan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengalami kegagalan dalam meraih opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Sebelumnya, pada tanggal 30 Mei 2023, BPK memberikan opini WDP pada Kota Bandung. Kotot Gutomo dari BPK menjelaskan bahwa masalah yang menghambat perolehan opini WTP antara lain disebabkan oleh kurangnya akuntabilitas LKPD yang disusun. Terdapat berbagai permasalahan seperti pengelolaan kas, persediaan, dan investasi permanen dan nonpermanen. Mayoritas permasalahan ini berasal dari pengelolaan aset tetap yang belum akuntabel. Kegagalan meraih opini WTP ini menimbulkan keprihatinan karena sebelumnya Kota Bandung selalu berhasil meraihnya selama empat tahun terakhir. Penurunan opini dari WTP menjadi WDP oleh BPK pada Pemerintah Kota Bandung ini didasarkan pada beberapa temuan, seperti penyajian aset tetap tanah, sarana prasarana serta utilitas umum yaitu Rp.3,43 triliun yang belum tercatat, kelebihan pembayaran pajak senilai Rp.10,14 miliar, dan sisa kas di bank tidak sesuai dengan saldo umum Rp.5,48 miliar. Temuan BPK tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem pengendalian internal serta kepatuhan pada aturan UU di lingkungan SKPD Kota Bandung. Permasalahan ini dikhawatirkan dapat berakibat pada menurunnya kualitas laporan keuangan dan berkurangnya kepercayaan publik pada pengelolaan keuangan daerah.

2. IDENTIFIKASI MASALAH/TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan, rumusan masalah yang diambil pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung
2. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung
3. Bagaimana Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung
4. Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah SKPD di Kota Bandung
2. Mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD di Kota Bandung
3. Mengetahui pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD di kota Bandung.

4. Mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD di Kota Bandung. Berdasarkan Latar belakang penelitian identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

3. TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

TINJAUAN TEORITIS

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No 71 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pengelolaan keuangan (Kuntadi dkk., 2022).

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Menurut Yusriwati et al., (2022), berkualitasnya laporan keuangan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh seberapa baik dan bagusnya pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah. Pengendalian internal yang baik akan memberikan dampak yang tinggi bagi suatu institusi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang tentunya berkualitas untuk disajikan. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terdiri dari Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Pemantauan.

Good Governance

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Menurut Maulana (2021) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu dengan membuat kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah serta menunjang kualitas laporan keuangan yang andal dan relevan sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak intern maupun pihak eksternal. Prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari 5 (lima) unsur berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsif, Independensi, serta Kesetaraan dan Kewajaran.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan informasi yang berisi tentang catatan keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan, (Ardiyos, 2017: 34). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai. Kualitas laporan keuangan mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang

berkualitas baik menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Firmansyah Dkk, 2022)

HIPOTESIS

- H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
- H2: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
- H3: *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
- H4: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, dan *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

4. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, *good governance* serta kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Bandung. Sedangkan pendekatan verifikatif digunakan untuk menguji teori melalui pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli. Teknik pengumpulan data diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden serta dari berbagai *literature* seperti jurnal, penelitian sebelumnya, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:38), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, yang kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1), sistem pengendalian internal (X2), dan *good governance* (X3), serta variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan pemerintah (Y). Dari variabel tersebut dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditentukan berdasarkan teori yang ada. Adapun dapat dilihat dari tabel operasionalisasi variabel sebagai berikut:

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Peneliti sebelumnya
Penerapan Standar	Penerapan standar	1. PSAP No. 01 2. PSAP No. 02	Ordinal	Yusriwati et al. (2022),

Akuntansi Pemerintah (X1)	akuntansi pemerintah (PSAP) adalah penggunaan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (Ardianto dan Eforis, 2019).	<ol style="list-style-type: none"> 3. PSAP No. 03 4. PSAP No. 04 5. PSAP No. 05 6. PSAP No. 06 7. PSAP No. 07 8. PSAP No. 08 9. PSAP No. 09 10. PSAP No. 10 11. PSAP No. 11 12. PSAP No. 12 		Cris Kuntadi et al. (2022), (Negara, 2020)
Sistem Pengendalian Internal (X2)	Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Ramadhan & Fahrani, 2024).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan 	Ordinal	Widari & Surisno (2017), Yusriwati et al. (2022), dan Ramadhan & Fahrani (2024), Safitri et al. (2023), Negara, (2020), Carolus Askikarno P, (2019)
Good Governance (X3)	Good governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas organisasi guna mewujudkan nilai-nilai atau tata kelola keuangan pemerintahan yang baik dalam jangka Panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan public berlandaskan peraturan perundang-undangan (Yusniyar et al., 2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparan 2. Akuntabilitas 3. Responsif 4. Independensi 5. Kesetaraan dan kewajaran 	Ordinal	Maulana M. (2021), Anggreni et al. (2018), dan Tuti Herawati & Defi Nopianti (2017) (Yusniyar et al., 2016).
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)	Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan. PSAK Nomor 1 (2015:2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami 	Ordinal	Widari & Surisno (2017), Yusriwati et al. (2022), Ramadhan & Fahrani (2024), Cris Kuntadi et al. (2022), Safitri et al. (2023), Negara, (2020), Carolus Askikarno P, (2019)

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas one-sample Kolmogorov-smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,88541794
Most Extreme Differences	Absolute	0,066
	Positive	0,056
	Negative	-0,066
Test Statistic		0,066
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

Sumber: Output SPSS, 2024

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov*. Dimana hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikan (Sig.) sebesar 0.200 atau lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual tersebut normal.

2) Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

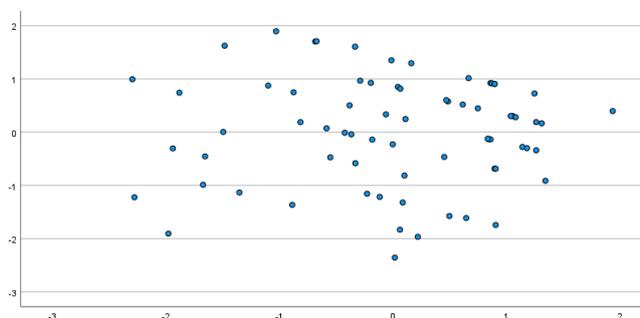
Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	0,865	1,156
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,590	1,695
<i>Good Governance</i> (X3)	0,460	1,785

Sumber: Output SPSS, 2024

Hasil dari uji multikolinearitas dari variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) yaitu sebesar 0,865, sistem pengendalian internal (X2) sebesar 0,590 dan *good governance* (X3) sebesar 0,560. Untuk nilai VIF dari masing-masing variabel yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) yaitu sebesar 1,156 sistem pengendalian internal (X2) sebesar 1,695 dan *good governance* (X3) sebesar 1,785. Dapat dikatakan bahwa untuk nilai VIF untuk ketiga variabel independent lebih kecil dari 10. Berdasarkan nilai *tolerance* dan VIF, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas yang signifikan dalam model regresi

3) Uji Heterokedastisitas

Scatterplot
Dependent: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah



Gambar 1 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS, 2024

Hasil uji heteroskedastisitas pada uji gletser diketahui bahwa pada model regresi ini variabel penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki, sistem pengendalian internal, dan *good governance* tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Dilihat dari gambar diatas bahwa titik-titik yang menyebar diatas tidak membentuk pola yang benar, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabelael tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Variabel	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	25,465	2,914
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan(X1)	0,172	0,027
Sistem Pengendalian Internal(X2)	-0,079	0,035
<i>Good Governance</i> (X3)	0,137	0,042

Sumber: Output SPSS, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan regresi, maka dapat dirumuskan sebuah persamaan linear berganda yaitu:

$$Y = 25,465 + 0,172X_1 - 0,079X_2 + 0,137X_3 + e$$

Hasil dari persamaan linear berganda diperoleh sebesar 25,465, artinya jika variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intenal, *good governance* bernilai 0 maka nilai kualitas laporan keuangan pemerintah bernilai 25,465. Koefisien nilai variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) bernilai 0,172. Artinya jika variabel independent lain bernilai tetap dan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat kenaikan 1% maka akan meningkatkan kualitas keuangan pemerintah sebesar 0,153. Koefisien nilai variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) bernilai-0,079. Artinya jika variabel independent lain bernilai tetap dan

variabel Sistem Pengendalian Internal terdapat kenaikan 1% maka akan mengurangi kualitas keuangan pemerintah sebesar -0,079. Koefisien nilai variabel *Good Governance* (X1) bernilai 0,137. Artinya jika variabel independent lain bernilai tetap dan variabel *Good Governance* terdapat kenaikan 1% maka akan meningkatkan kualitas keuangan pemerintah sebesar 0,137.

c. Koefisien Determinasi

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.714 ^a	0,510	0,488	0,96390

Sumber: Output SPSS,2024

Hasil koefisien determinasi dengan nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,488 atau 49%. Artinya bahwa variabilitas variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah yang dapat dijelaskan oleh variabel independent yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan *Good Governance* sebesar 49% sisanya 51% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

d. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

**Tabel 6. Uji t
Coefficients^a**

Variabel	t	Sig.
(Constant)	8,738	0,000
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan(X1)	6,397	0,000
Sistem Pengendalian Internal (X2)	-2,268	0,027
<i>Good Governance</i> (X3)	3,281	0,002

Sumber: Output SPSS,2024

Hasil yang diperoleh dari uji t menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X1) memiliki nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,000 atau lebih kecil 0,05. Dikarenakan nilai signifikansi (Sig.) $0,000 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD di Kota Bandung atau H_a diterima dan H_0 tidak diterima. Variabel sistem pengendalian internal (X2) memiliki nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,027 atau lebih kecil dari 0,05. Dikarenakan nilai signifikansi (Sig.) $0,027 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD di Kota Bandung atau H_a diterima dan H_0 tidak diterima. Variabel *good governance* (X3) memiliki nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 0,05. Dikarenakan nilai signifikansi (Sig.) $0,002 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah pada SKPD di Kota Bandung atau H_0 diterima dan H_0 tidak diterima.

e. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Tabel 7. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	63,862	3	21,287	22,912	.000 ^b
	Residual	61,320	66	0,929		
	Total	125,182	69			

Sumber: Output SPSS, 2024

Hasil yang diperoleh dari Uji F menunjukkan bahwa hasil perhitungan yang diperoleh dari fhitung sebesar 22,912 yang berarti nilainya lebih besar dari ftabel sebesar 2,74. Hasil dari perbandingan nilai (Sig.) yaitu $0.000 < 0,05$ dan fhitung sebesar 22,912 lebih besar dari f tabel sebesar 2,74 maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan *good governance* berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil penelitian untuk variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1), sebagaimana dapat dilihat dari tabel uji t, memiliki nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,000 atau lebih kecil 0,05. Diliat dari nilai signifikansi (Sig.) $0,000 < 0,05$ atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Jadi H_0 ditolak H_a diterima menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y). Artinya SKPD di Kota Bandung berhasil menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010. Standar akuntansi pemerintahan merupakan standar yang dapat menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunaanya (Kuntadi, dkk., 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yusriwanti et al., (2022) dan Ramadhan & Fahrani (2024) yang menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil penelitian untuk variabel Sistem Pengendalian Internal (X2), sebagaimana dapat dilihat dari tabel uji t, menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.) $0,027 < 0,05$ atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Jadi H_0 ditolak dan H_a diterima menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal (X2) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y). Artinya sistem pengendalian internal pada SKPD di Kota Bandung berjalan secara efektif. Sistem pengendalian internal yang diterapkan dengan baik dapat memberikan keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yusriwanti et al., (2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sebaliknya hasil dari penelitian Ramadhan & Fahrani (2024) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

3. Pengaruh *Good Governance* terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil penelitian untuk variabel *Good Governance* (X3), sebagaimana dapat dilihat dari tabel uji t, menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.) $0,002 < 0,05$ atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Jadi H_0 ditolak dan H_a diterima menyatakan bahwa *Good Governance* (X3) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y). Penerapan *good governance* bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan adanya tata kelola yang baik (*good governance*) dapat mendukung terciptakan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan keputusan yang efektif dan efisien serta dapat memberikan kepercayaan serta pertanggungjawaban kepada publik. Hasil dari penelitian Maulana M, (2021), Anggreni et al., (2018) dan Herawati dan Nopianti (2017) yang menunjukkan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

4. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2) dan *Good Governance* (X3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y). Dari hasil perhitungan diperoleh dari F_{hitung} sebesar 22,912 yang berarti nilainya lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,74. Hasil dari perbandingan nilai (Sig.) yaitu $0,000 < 0,05$ dan F_{hitung} sebesar 22,912 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,74. Jadi apabila penerapan standar akuntansi pemerintahan baik, maka meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas, sistem pengendalian internal yang efektif dapat memastikan bawa standar akuntansi pemerintahan diterapkan secara akurat dan konsisten, serta *good governance* dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD di Kota Bandung. Dapat diartikan bahwa pada SKPD di Kota Bandung sudah menerapkan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan standar akuntansi yang baik akan memberikan manfaat bagi pengelolaan keuangan yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
2. Sistem pengendalian internal secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD di Kota Bandung. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat memastikan bahwa transaksi keuangan dicatat dengan benar, aset dilindungi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terjaga sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat.
3. *Good governance* secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD Kota Bandung. Maka dapat diartikan bahwa dengan menerapkan tata kelola yang baik dengan menggunakan

prinsip-prinsip akan menciptakan lingkungan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan laporan keuangan yang berkualitas.

4. Penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan *good governance* secara keseluruhan atau secara simultan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD di Kota Bandung.

7. DAFTAR PUSTAKA

Anggreni, N. M. M., Widanaputra, A. A. G. P., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2018). Pengaruh *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1), 352–380.

Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 95-136.

Ardiyos. 2017. *Kamus Standar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima Andayani

Askikarno, C., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2019). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAMASA). In *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* (Vol. 4, Issue 2). <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi>

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1*. PSAK No. 1. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Firmansyah, A., Arfiansyah, Z., & Yuniar, M. R. (2022). Local governments financial reporting quality in Papua and West Papua: Do local government characteristics matter? *JRAK*, 14(2), 139-147.

Hasanah.id. (2024, April 1). Pemerintah Kota Bandung Gagal Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. <https://bandungbergerak.id/article/detail/158592/catatan-bpk-terhadap-laporan-keuangan-pemkot-bandung>

Herawati, T., & Nopianti, D. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *STAR*, 14(2), 32-45.

Kuntadi, C., Saragi, J. E. M., & Syafira, S. I. (2022). PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Teknologi (JIMT)*, 3(5), (halaman awal-akhir). <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i5>

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Maulana M, R. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(1), 126–137.
- Negara, I. G. N. S. H. (2020). “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, Vol. 14(No. 1), 16–35.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d
- Ramadhan, R., & Fahrani, U. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(1), 229–247. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3638>
- Safitri, E., Amiruddin, Selong, A., Tenriwaru, & Basalamah, M. S. A. (2023). Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Center of Economic Students Journal*, 6(1), 22–30.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D. Alfabeta. Bandung
- Yusniyar, D., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern terhadap good governance dan dampaknya pada kualitas laporan keuangan (Studi pada SKPA pemerintah Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(2).
- YUSRIWARTI, Y., & SUSANTI, N. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kab. Inhil). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 34-44.
- Widari, L., & Sutrisno. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 5(10), hal 117–126.